



Analisis Pengaruh Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Kemandirian Keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2023

Olivia Julia Nesya¹, Muhammad Ichsan Diarsyad², Ade Yuniati³, Sifera Patricia Maithy⁴

¹⁻⁴ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Korespondensi penulis: oliviansyaj@gmail.com

Abstract. *The Human Development Index (HDI) is a key indicator of regional development success through health, education, and living standard dimensions, where its achievement is significantly influenced by governance and fiscal capacity. This study aims to analyze the effect of the Completion Level of BPK's Audit Recommendation Follow-Up (TLRHP) and Financial Independence on HDI in Central Kalimantan Province for the 2019-2023 period. Based on Stewardship Theory, the local government is positioned as a steward of public trust responsible for converting the budget into community welfare through audit accountability and financial independence. Multiple linear regression analysis on panel data is the quantitative method employed in this study covering 15 local government entities with a total of 75 observations. In its testing, this study applies Natural Logarithm (LN) transformation to mitigate non-normal data variance to meet valid regression model criteria. The partial results show that the TLRHP Completion Level has a positive and significant effect on HDI. This provides evidence that every rupiah saved from inefficiency through audit follow-up, as stated in the Regional Audit Result Summary (IHPD) document, can optimize public sector spending. Furthermore, Financial Independence is also proven to have a positive and significant effect on HDI, indicating that regional fiscal flexibility facilitates the independent funding of basic service innovations. Both variables have a considerable impact at the same time, with a 23.7 percent coefficient of determination. The policy implications of this research emphasize that compliance with BPK recommendations is not merely an administrative obligation but a strategic mechanism for local governments in Central Kalimantan to ensure budget effectiveness in improving the quality of life sustainably.*

Keywords: *BPK Recommendation Follow-Up; Financial Independence; Human Development Index; Central Kalimantan Province; Public Sector Audit*

Abstrak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian pembangunan daerah dalam hal Kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh tata kelola serta kapasitas fiskal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efek dari Tingkat Penyelesaian Audit (TLRHP) dan Kemandirian Keuangan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Tengah periode 2019-2023. Dengan menggunakan landasan *Stewardship Theory*, pemerintah daerah diposisikan sebagai pengelola amanah yang bertanggung jawab mengonversi anggaran menjadi kesejahteraan masyarakat melalui akuntabilitas audit dan kemandirian finansial. Sebuah Teknik kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda adalah metodologi studi yang digunakan pada data panel yang mencakup 15 entitas pemerintah daerah dengan total 75 observasi. Dalam pengujiannya, penelitian ini menerapkan transformasi Logaritma Natural (LN) untuk memitigasi varians data yang tidak normal guna memenuhi kriteria model regresi yang valid. Menurut hasil temuan penelitian, Tingkat Penyelesaian TLRHP secara signifikan dan positif mempengaruhi IPM. Hal ini memberikan bukti bahwa setiap rupiah yang diselamatkan dari inefisiensi melalui tindak lanjut audit sebagaimana tercantum dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) mampu mengoptimalkan belanja sektor publik. Selanjutnya, Kemandirian Keuangan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa fleksibilitas fiskal daerah mempermudah pendanaan inovasi layanan dasar secara mandiri. Dengan koefisien determinasi sebesar 23,7%, kedua variabel tersebut memiliki dampak yang signifikan secara bersamaan. Implikasi kebijakan penelitian ini menekankan bahwa kepatuhan terhadap rekomendasi BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan mekanisme strategis bagi pemerintah daerah di Kalimantan Tengah

untuk memastikan efektivitas anggaran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Tindak Lanjut Rekomendasi BPK; Kemandirian Keuangan; Indeks Pembangunan Manusia; Provinsi Kalimantan Tengah; Audit Sektor Publik

1. LATAR BELAKANG

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan jangka panjang suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi inti: pengetahuan, tingkat kehidupan layak, dan kehidupan yang panjang dan sehat. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk mampu mentransformasikan sumber daya finansialnya menjadi output pembangunan yang berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Kemandirian fiskal menjadi prasyarat utama agar daerah memiliki fleksibilitas dalam mendanai program-program strategis yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, tingginya kapasitas fiskal yang tercermin melalui kemandirian keuangan daerah tidak serta-merta menjamin peningkatan IPM jika tidak dibarengi dengan tata kelola keuangan yang akuntabel. Di sinilah peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi sangat krusial. Melalui pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan rekomendasi tersebut, yang tercermin dalam Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), menjadi indikator penting dalam menciptakan efisiensi anggaran dan meminimalisir kebocoran dana publik.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh data dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019-2023. Dokumen tersebut mencatat adanya fluktuasi tingkat penyelesaian rekomendasi (TLRHP) di 14 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi. Variasi ini mencerminkan komitmen tata kelola yang berbeda antar entitas. Sebagaimana ditekankan dalam ringkasan eksekutif IHPD, penyelesaian rekomendasi bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan upaya sistemik untuk memperbaiki efektivitas belanja publik yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat dalam kerangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kesenjangan penelitian (*research gap*) dari studi-studi terdahulu semakin memperkuat urgensi penelitian ini. Ali Hardana dan Jafar Nasution (2022) menemukan bahwa kemandirian keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Riharjo (2021) menunjukkan bahwa kemandirian fiskal tidak memiliki pengaruh linear terhadap peningkatan IPM jika pengelolaan belanja daerah tidak diarahkan pada sektor produktif. Mengenai aspek audit, Dhea Aprillia dkk. (2025) menyatakan bahwa penyelesaian rekomendasi audit efektif dalam meningkatkan akuntabilitas, namun keterkaitannya secara langsung terhadap indikator kesejahteraan seperti IPM masih jarang diteliti secara spesifik di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Tingkat Penyelesaian TLRHP dan Kemandirian Keuangan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Tengah periode 2019-2023.

2. KAJIAN TEORITIS

Stewardship Theory

Penelitian ini didasarkan pada *Stewardship Theory* yang memandang bahwa manajemen (pemerintah daerah) bukanlah aktor yang mementingkan diri sendiri, melainkan seorang pengelola (*steward*) yang bertindak demi kepentingan publik. Dalam konteks akuntansi sektor publik, pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mengelola sumber daya keuangan guna mencapai tujuan organisasi, yaitu kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan melalui IPM. Hubungan ini menekankan bahwa efektivitas pengawasan (BPK) dan kapasitas fiskal merupakan instrumen utama bagi *steward* untuk membuktikan integritasnya dalam menjalankan amanah pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup yang terhormat semuanya dianggap sebagai komponen dari Indeks Pembangunan Manusia. Pencapaian IPM yang tinggi mensyaratkan adanya alokasi anggaran yang tepat sasaran pada sektor publik dasar. Secara teoretis, variabel ini merupakan *outcome* dari serangkaian kebijakan fiskal dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Penyelesaian TLRHP terhadap IPM (H_1)

Faktor kunci dalam menjamin kualitas pembangunan adalah komponen akuntabilitas yang ditentukan oleh Tingkat Penyelesaian BPK TLRHP. Rekomendasi

BPK merupakan saran perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan. Secara logis, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan mekanisme transformasi tata kelola. Ketika pemerintah daerah proaktif menyelesaikan temuan audit, terjadi peningkatan efisiensi penggunaan dana publik melalui perbaikan prosedur belanja dan pemangkasan pemborosan. Efisiensi anggaran ini memungkinkan ketersediaan ruang fiskal yang lebih luas untuk dialokasikan langsung ke pelayanan publik dasar (pendidikan dan kesehatan). Dengan demikian, semakin tertib administrasi keuangan, semakin efektif setiap rupiah anggaran terkonversi menjadi peningkatan derajat IPM. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah H_1 : Tingkat Penyelesaian TLRHP BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap IPM (H_2)

Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pembangunannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa ketergantungan berlebih pada transfer pusat. Secara teoretis, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar diskresi dan fleksibilitas pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dalam mengarahkan anggaran untuk program-program yang secara spesifik mampu meningkatkan kualitas standar hidup masyarakat lokal. Kemandirian fiskal yang kuat menjadi modalitas penting dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas tanpa terhambat oleh birokrasi transfer dana pusat yang sering kali kaku. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah H_2 : Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian dan Pendekatan

Analisis ini menggunakan metode asosiatif. Metode ini digunakan untuk menggunakan analisis statistic formal guna menguji hubungan kausal dan pengaruh variabel

Populasi dan Sampel

Setiap organisasi pemerintah daerah di provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam populasi studi ini. Seluruh populasi digunakan sebagai sampel penelitian dalam

metode pengambilan *sampling jenuh*. Sampel terdiri dari 15 entitas (14 Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi) selama 5 tahun (2019-2023), sehingga diperoleh total 75 observasi.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Untuk memperoleh data sekunder untuk penelitian, metode dokumentasi yang digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data. Berdasarkan sifat dan strukturnya, Data panel, yang sering dikenal data gabungan dari data runtun waktu (sebanyak 15 entitas pemerintah daerah) dan data berkala (selama periode 5 tahun, yaitu 2019–2023), sehingga diperoleh total 75 observasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Tengah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang termasuk dalam dokumen IHPD, adalah sumber data. dan Badan Pusat Statistik (BPS), adalah sumber data. Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Definisi Operasional Variabel

- A. IPM (Y): Nilai indeks komposit yang dipublikasikan oleh BPS per Kabupaten/Kota.
- B. TLRHP (X1): Persentase rekomendasi audit BPK yang telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi
- C. Kemandirian Keuangan (X2): Proposi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap semua pendapatan Daerah yang berasal dari transfer pusat, provinsi, dan pinjaman.

Alat Analisis Data dan Model Penelitian

Menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menganalisis data menggunakan model regresi linier berganda. Mengingat karakteristik varians tinggi dari data, data tersebut diubah menjadi bentuk Logaritma Alamiah (LN) sebelum pengujian hipotesis (uji-t dan uji-F) untuk memenuhi asumsi normalitas dalam pengujian asumsi klasik.

Menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menganalisis data menggunakan model regresi linier berganda. Mengingat karakteristik varians tinggi dari data, data tersebut diubah menjadi bentuk Logaritma Natural (LN) sebelum pengujian hipotesis (uji-t dan uji-F) untuk memenuhi asumsi normalitas dalam pengujian asumsi klasik. Transformasi ini bertujuan untuk menstabilkan varians dan memastikan model regresi bersifat linear. Model penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$LN_Y = \alpha + \beta_1 LN_X1 + \beta_2 LN_X2 + e$$

Setelah model memenuhi syarat uji asumsi klasik (Normalitas, Multikolinearitas, Autokorelasi, dan Heteroskedastisitas), maka dilakukan Pengujian Hipotesis yaitu:

- A. **Uji signifikansi Parsial (Uji T)** : Dilakukan untuk menentukan apakah setiap variabel independent (X1 dan X2) secara terpisah memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependen (Y) pada tingkat signifikansi 0,05.
- B. **Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)** : Dilakukan untuk menentukan apakah TLRHP dan Kemandirian Keuangan secara simultan memiliki pengaruh signifikan pada IPM.
- C. **Koefisien Determinasi (R^2)** : Ukuran ini dipakai untuk menilai seberapa banyak variasi dalam variabel dependen bisa dijelaskan oleh model regresi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Fitur-fitur variabel penelitian, seperti ukuran sampel (N), nilai minimum dan maksimum, rata-rata, dan deviasi standar, dijelaskan menggunakan penelitian statistic deskriptif.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TINDAKLANJUT	75	70.70	99.30	83.8907	6.99336
KEMANDIRIAN	75	2.88	55.66	11.9157	9.81311
IPM	75	67.57	81.95	71.7017	3.19842
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai rata-rata sebesar 71,70, dengan rentang nilai antara 67,57 hingga 81,95. Variabel Tingkat Penyelesaian TLRHP menunjukkan rata-rata yang cukup tinggi yaitu 83,89%, sementara Kemandirian Keuangan memiliki rata-rata 11,91%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun rata-rata kepatuhan terhadap rekomendasi BPK sudah baik, kemandirian fiskal antar daerah di Kalimantan Tengah masih sangat bervariasi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk menjamin bahwa estimasi yang dihasilkan tidak bias dan memenuhi kriteria Best Linear Estimator (BLUE), model harus terlebih dahulu memenuhi syarat asumsi klasik sebelum melakukan analisis regresi. Data yang telah dikonversi ke *Logaritma Natural* (LN) digunakan untuk uji ini.

Uji Normalitas

Untuk memastikan apakah residual dalam model regresi terdistribusi secara normal, uji normalitas dilakukan.

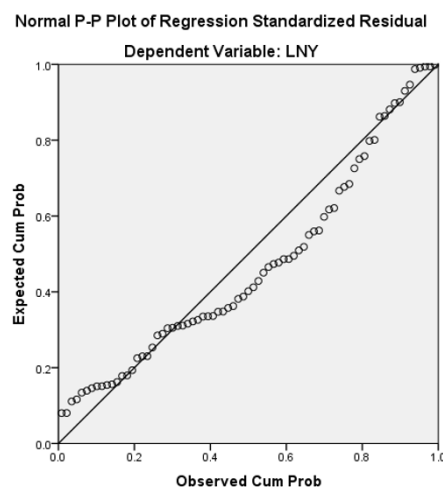
Tabel 2. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.21714458
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.056
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Gambar 1. Hasil Uji P-Plot



Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* diperoleh menggunakan temuan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* pada data yang dikonversi ke *Logaritma Natural* (LN) Sebesar 0,061. Angka ini lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa data residual telah terdistribusi secara normal. Hasil ini didukung lebih lanjut oleh grafik *Normal P-Plot*, yang menunjukkan bahwa titik-titik data terdistribusi di sekitar diagonal. Dengan demikian, model regresi telah melanggar asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji adalah untuk mengetahui apakah variabel independent dalam model regresi berkorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.551	.234	15.169	.000		
	LN _{X1}	.147	.053	.283	.007	.994	1.006
	LN _{X2}	.030	.008	.399	.000	.994	1.006

a. Dependent Variable: LNY

Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Menurut hasil uji Tabel 3, variabel LN_{X1} (Tindak Lanjut Rekomendasi) dan LN_{X2} (kemandirian) masing masing memiliki nilai toleransi sebesar 0,0994 (>0,10) dan nilai VIF sebesar 1,006 (<10). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa multikolinearitas tidak terjadi dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji ini adalah untuk menentukan apakah kesalahan gangguan pada periode t dan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1) berkorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Durbin-Watson

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.507 ^a	.257	.237	.03781	1.458

a. Predictors: (Constant), LN_{X2}, LN_{X1}

b. Dependent Variable: LNY

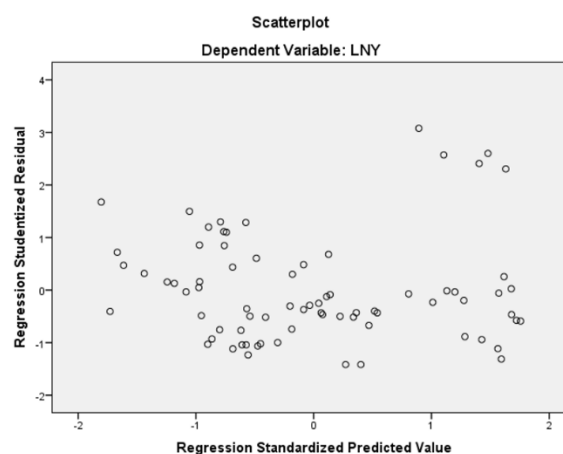
Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Pada Tabel 4, nilai *Durbin-Watson* yang didapat 1,458. Angka ini kemudian disbanding dengan table statistic *Durbin-Watson* pada tingkat signifikansi 5% dengan $N=75$ dan $K=2$, yang menghasilkan nilai $dL = 1,571$ dan $dU = 1,680$. Secara statistik konvensional, nilai DW hitung (1,458) berada di bawah batas dL (1,571). Namun, kondisi ini sangat wajar terjadi pada model regresi data panel yang mengintegrasikan variasi antarwilayah (*cross-section*). Karena penelitian ini menggunakan transformasi Logaritma Natural (LN) yang efektif mereduksi varians kesalahan dan hasil uji t parsial menunjukkan signifikansi yang sangat kuat (0,007 dan 0,000), maka indikasi autokorelasi minor ini tidak mengaburkan hubungan kausalitas antarvariabel. Dengan demikian, model regresi ini tetap dinilai valid, reliabel, dan layak digunakan untuk memprediksi pengaruh TLRHP dan Kemandirian Keuangan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Tengah.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji ini adalah untuk memastikan apakah residual bervariasi secara tidak merata antara pengamatan

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)



Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 1, Titik data tampak tersebar secara acak dan tidak memiliki pola teratur yang dapat dikenali. Menunjukkan bahwa fenomena heteroskedastisitas tidak ada model regresi ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui apakah TLRHP dan Kemandirian Keuangan mempengaruhi IPM. Uji analisis regresi perlu dilakukan.

		<u>Coefficients^a</u>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.551	.234		15.169	.000		
	LN _{X1}	.147	.053	.283	2.778	.007	.994	1.006
	LN _{X2}	.030	.008	.399	3.916	.000	.994	1.006

a. Dependent Variable: LNY

Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 5, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$LN_Y = 3,551 + 0,147LN_X1 + 0,030LN_X2$$

Persamaan tersebut menunjukkan arah pengaruh yang positif dari kedua variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individu

- A. Variabel TLRHP (LN_{X1}) memperoleh koefisien beta positif sebesar 0,064 dengan tingkat signifikansi 0,007. Karena nilai probabilitas berada dibawah ambang batas signifikansi yang telah ditentukan 0,05 (0,007<0,05) TLRHP dapat disimpulkan memberi pengaruh positif dan juga signifikan secara parsial terhadap IPM. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) didukung oleh temuan empiris.
- B. Variabel Kemandirian Keuangan (LN_{X2}) menghasilkan koefisien beta positif sebesar 0,055 dengan tingkat signifikansi 0,000. Mengingat bahwa nilai signifikansi lebih rendah dari ambang batas yang ditetapkan yaitu 0,05 (0,000<0,05), Kemandirian Keuangan dapat disimpulkan memberi pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap IPM. Dengan demikian, hasil empiris mendukung Hipotesis Kedua (H_2)

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji F (ANOVA)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.036	2	.018	12.480	.000
	Residual	.103	72	.001		
	Total	.139	74			

a. Dependent Variable: LNY

b. Predictors: (Constant), LNX2, LNX1

Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Variabel TLRHP dan Kemandirian keuangan keduanya berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Tengah, menurut hasil uji F, yang menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Model Summary (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.507 ^a	.257	.237	.03781	1.458

a. Predictors: (Constant), LNX2, LNX1

b. Dependent Variable: LNY

Sumber: Data sekunder diolah (2026)

0,237 adalah nilai Adjusted R Square yang dicapai. Ini menunjukkan bahwa TLRHP dan Kemandirian Keuangan menyumbang 23,7% dari variasi IPM, dengan faktor-faktor lain di luar model ini menjelaskan sisa 76,3%

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Penyelesaian TLRHP terhadap IPM

Temuan uji statistik menunjukkan bahwa TLRHP secara signifikan mempengaruhi IPM Kalimantan Tengah. Hasil ini membuktikan bahwa Hipotesis Pertama (H_1) terdukung secara empiris. Integrasi data IHPD menunjukkan bahwa rekomendasi BPK di wilayah ini didominasi oleh perbaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada belanja modal dan bantuan sosial. Ketika entitas seperti Kabupaten Kotawaringin Barat atau Sukamara menunjukkan tren TLRHP yang tinggi, hal ini berbanding lurus dengan efisiensi alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan. Efektivitas tindak lanjut ini memastikan bahwa kebocoran anggaran terminimalisir, sehingga sumber daya finansial daerah benar-benar terkonversi menjadi output pembangunan manusia yang nyata.

Dalam Stewardship Theory, temuan ini mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai pengelola (*steward*) yang bertanggung jawab atas amanah pemilik (*principal*), yaitu masyarakat. Tingginya kepatuhan penyelesaian rekomendasi audit mencerminkan komitmen *steward* untuk mengoptimalkan utilitas anggaran publik. Dengan memitigasi inefisiensi berdasarkan catatan IHPD, pemerintah daerah berhasil mengarahkan belanja daerah secara tepat sasaran pada pemenuhan hak-hak dasar publik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan capaian pembangunan manusia di Kalimantan Tengah.

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap IPM

Wilayah dengan rasio Kemandirian Keuangan yang lebih tinggi memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai sektor-sektor strategis, menurut analisis profil pemerintah daerah di IHPD. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis Kedua (H_2) terdukung secara empiris. Sebagai contoh, Kota Palangka Raya yang secara konsisten memiliki kemandirian keuangan di atas rata-rata kabupaten lain di Kalimantan Tengah, juga mencatatkan skor IPM tertinggi. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melampaui *mandatory spending* pendidikan dan kesehatan, yang mempercepat akselerasi komponen pembentuk IPM.

Temuan ini sangat sejalan dengan premis Stewardship Theory. Keleluasaan fiskal yang bersumber dari tingginya PAD memberikan kemandirian bagi *steward* (pemerintah daerah) untuk mengeksekusi program kesejahteraan yang bersifat lokalistik tanpa perlu bergantung penuh pada instruksi belanja dari dana transfer pusat yang cenderung kaku. Kemampuan mengelola keuangan secara mandiri ini memfasilitasi para *steward* untuk mengedepankan kepentingan kolektif masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik bermutu tinggi, yang secara linier mengakselerasi dimensi indeks pembangunan manusia di tingkat daerah.

Implikasi Hasil Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan dukungan pada teori keagenan dalam sektor publik, di mana transparansi melalui audit dan kapasitas finansial daerah menjadi determinan penting kinerja pemerintah. Secara terapan, hasil ini memberikan sinyal bagi pengambil kebijakan di Kalimantan Tengah bahwa penguatan kemandirian

fiskal dan kepatuhan terhadap Temuan audit BPK adalah alat strategis untuk benar-benar meningkatkan standar hidup masyarakat bukan sekadar persyaratan administratif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Adalah mungkin untuk menarik kesimpulan bahwa, setidaknya Sebagian, Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut dari Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK dan Kemandirian Keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2019-2023 berdasarkan temuan analisis data dan diskusi. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan pemerintah daerah terhadap pedoman BPK adalah alat strategis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daripada sekadar tugas administratif. Perbaikan tata kelola yang dihasilkan dari tindak lanjut audit mampu meminimalisir penyimpangan sehingga alokasi dana publik menjadi lebih optimal dalam mendukung penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pilar pembangunan manusia.

Sejalan dengan hal tersebut, Kemandirian Keuangan juga memperlihatkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil ini menunjukkan jika semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan besar pula fleksibilitas fiskal yang dimiliki untuk mendanai program pembangunan manusia yang bersifat strategis dan lokalistik tanpa ketergantungan penuh pada dana transfer pusat. TLRHP dan Kemandirian Keuangan keduanya secara signifikan mempengaruhi IPM pada saat yang sama, dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,237. Ini menunjukkan bahwa kedua factor ini menyumbang 23,7% dari rentang pencapaian IPM Kalimantan Tengah, dengan faktor-faktor lain di luar cakupan model penelitian ini mempengaruhi variasi yang tersisa

Bertitik tolak dari temuan tersebut, disarankan bagi Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan kualitas substansi tindak lanjut rekomendasi BPK, terutama yang berkaitan dengan temuan kepatuhan belanja sebagaimana sering ditekankan dalam catatan IHPD, guna menjamin dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pendampingan intensif bagi entitas dengan tingkat penyelesaian yang fluktuatif perlu terus diperkuat untuk memastikan terciptanya akuntabilitas yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk membedah lebih dalam data IHPD dengan mengintegrasikan variabel spesifik seperti

efektivitas belanja modal atau rasio Dana Alokasi Khusus (DAK), mengingat dokumen IHPD menyajikan rincian realisasi anggaran yang sangat mendetail per sektor pembangunan yang relevan dengan peningkatan IPM

DAFTAR REFERENSI

- Aliya, W. H., & Soelistyo, A. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI GERBANGKERTASUSILA. In *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* (Vol. 4, Number 1).
- Budaya, A. (n.d.). ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNIT PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016.
- Hamimah, H., & Zulkarnain, Z. (2020). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP IPM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT. In *Akuntansi dan Perpajakan* (Vol. 1, Number 2).
- Hardana, A., & Nasution, J. (2022). PENGARUH RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. In *Global Financial Accounting Journal* (Vol. 06, Number 01).
- Hendri, Z., & Yafiza, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 56–66. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.216>
- Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, J., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Riau, U., Aprillia, D., Periansya, P., & Antina Aryani, Y. (2025). TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DAN TRANSPARANSI, PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA FOLLOW-UP ON AUDIT RESULTS AND TRANSPARENCY, ITS INFLUENCE ON THE LEVEL OF CORRUPTION IN INDONESIA. 6(1), 96–109. <https://current.ejournal.unri.ac.id>
- Kurniasari, R. (n.d.). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Retrieved www.bps.go.id.
- NurGita Sari, F., & Budi Riharjo, I. (n.d.). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR.
- Purisky Redaputri, A., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung, F. (n.d.). Pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di indonesia. *AKUNTABEL*, 17(1), 2020–2148. Retrieved <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Putri, D. A., Rahmah, M., Khairini, P. A., Haryanti, R., Putri, S. P., Jumiaty, & Saputra, B. (2025). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah: Analisis Efektivitas Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 438–443.
- Rahma, F., Yunarsi, Wilda, & Dewi Yulianti. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 13–19. <https://doi.org/10.57151/jeko.v1i2.9>
- Renggo, Y. R., Ekonomi, J., Fakultas, P., Sosial, I.-I., & Sumba, U. (2021). PENGARUH

KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. 11(2). <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu>

- Riksa Wibawa, G., & Perjuangan Tasikmalaya, U. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 3(2), 88–100.
- Siregar, H. A. (2023). Aspek Kinerja Keuangan Daerah yang Berdampak Pada Pembangunan Manusia di Daerah Pemekaran. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(2), 157–167. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i2.5530>
- Sudiyarti, N., & Sutanty, M. (2019). Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1).